



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telepon (021) 5253004 (8 saluran) Ext.363 Faksimile (021) 5253137
Laman www.kemenkumham.go.id

Nomor : SEK.2.KP.07.01-33
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Batas waktu pengiriman data e-PUPNS 2015.

29 September 2015

Yth. 1. Sekretaris Unit Eselon I
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Di Tempat

Berdasarkan informasi dari aplikasi AdminPUPNS, bahwa pegawai yang telah melakukan pendaftaran s.d tanggal 29 September 2015 berjumlah 41.702 pegawai. Dari jumlah tersebut baru 14 pegawai yang telah dikirimkan data elektroniknya oleh verifikator level I (Unit Eselon I dan Kantor Wilayah) ke verifikator level 2 (Biro Kepegawaian). Guna memenuhi batas waktu penyelesaian ePUPNS 2015, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. mendorong para pegawai agar segera menyelesaikan pengisian data EPUPNS sehingga cetakan dan data elektronik PUPNS serta lampiran dokumen pendukung (bila dilakukan perubahan / penambahan data) dapat dikirimkan oleh verifikator jajaran Saudara kepada verifikator level 2 **paling lambat tanggal 30 Oktober 2015** (bagi unit Eselon I dan Kanwil yang telah menerima diseminasi) dan **paling lambat tanggal 30 November 2015** (bagi Kanwil yang akan menerima diseminasi pada bulan Oktober);
2. menginventarisasi pegawai yang bermasalah pada saat melakukan pendaftaran dan menyampaikannya kepada Biro Kepegawaian melalui *email* pupns.kemenkumham@gmail.com paling lambat tanggal 15 November 2015;
3. bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang belum mengirimkan data pegawai berdasar GPP (sebagaimana terlampir) paling lambat tanggal 15 Oktober 2015 telah mengirimkan data tersebut melalui *email* tuk.hukumdanham@gmail.com dengan format *Ms. Excel*.

Atas perkenan dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS JENDERAL
Kepala Biro Kepegawaian,

Drs. M. Arifin H. A., M.M.
NIP. 195912021081031001

Tembusan :
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM

Lampiran Surat Sekretaris Jenderal
Kementerian Hukum dan HAM

Nomor : SEK.2.KP.07.01-33

Tanggal : 29 September 2015

**DAFTAR JAJARAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
YANG BELUM MENGIRIMKAN DATA GPP**

1. Aceh - 2 UPT (LP Blangpidie, LP Wanita Sigli)
2. Bengkulu – 1 UPT (Rutan Bengkulu)
3. DKI Jakarta – 2 UPT (Rutan Jakarta Timur dan Kanim Jakarta Pusat)
4. Banten – 1 UPT (LP Serang)
5. D.I Yogyakarta – 1 UPT (Rupbasan Yogyakarta)
6. Jawa Timur – 8 UPT (Bapas Pamekasan, Kanim Jember, LP Malang, LP Blitar, LP Bondowoso, LP Narkotika Madiun, Rupbasan Blitar, Rutan Bangkalan).
7. Gorontalo – 1 UPT (LP Pahuwato)
8. Maluku Utara – (Kanwil dan seluruh Jajaran UPT belum mengirimkan data GPP)
9. Papua Barat – 1 UPT (LP Fakfak)

**DAFTAR KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
YANG TELAH MENERIMA DISEMINASI**

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Papua Barat | 10. Jambi |
| 2. Jawa Barat | 11. Kalimantan Barat |
| 3. Sulawesi Selatan | 12. Sumatera Selatan |
| 4. Sumatera Utara | 13. Bengkulu |
| 5. Jawa Tengah | 14. Bangka Belitung |
| 6. Nusa Tenggara Timur | 15. Kalimantan Timur |
| 7. Aceh | 16. Lampung |
| 8. Papua | 17. Sulawesi Utara |
| 9. Jawa Timur | |

a.n. SEKRETARIS JENDERAL
Kepala Biro Kepegawaian,

Drs. M. Arifin H. A., M.M.
NIP. 195912021981031001